

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian dari bab sebelumnya, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kedua variabel penelitian ternyata implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang diaplikasikan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas Pengentasan Buta Aksara (Studi pada UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timor Kabupaten Timor Tengah Utara). Dimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah secara keseluruhan berada pada kondisi Cukup, dan Efektivitas pengentasan buta aksara secara keseluruhan berada pada kondisi Cukup. Dengan demikian Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah belum secara menyeluruh dapat dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor krusial implementasi kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
- 2) Hasil perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh “Kuat dan Signifikan” terhadap efektivitas pengentasan Buta Aksara (Studi pada UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Miomaffo Timor Kabupaten Timor Tengah Utara). Namun pengaruh yang

diberikan masih dalam taraf Cukup Baik. Artinya untuk tercapainya Efektivitas Pengentasan Buta Aksara di Kecamatan Miomaffo, masih banyak faktor-faktor lain yang harus diteliti dan dikaji lebih lanjut selain dari faktor-faktor krusial implementasi kebijakan.

- 3) Menurut asumsi dari peneliti, selain faktor implementasi kebijakan pemerintah daerah, terdapat pula faktor lain yang tidak diteliti yaitu kurangnya “pengawasan” dan “koordinasi” diantara aparat pelaksana kebijakan.

Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dengan kata lain penelitian ini dapat teruji secara empirik.

## **5.2. Saran-Saran**

### **5.2.1. Saran Teoritis**

- a. Khususnya dalam pelaksanaan pengentasan Buta Aksara di Kecamatan Miomaffo pihak pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan “faktor-faktor krusial implementasi kebijakan” melalui komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi secara menyeluruh yang diberlakukan pada kegiatan pengentasan buta aksara di Kecamatan Miomaffo Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Diharapkan pada pihak pemerintah daerah/masyarakat dapat melakukan penelitian lanjutan dan pendekatan lainnya yang ada sangkut pautnya dengan bidang kajian Ilmu Pemerintahan dalam menangani kegiatan pengentasan Buta Aksara, seperti pengawasan pengentasan Buta Aksara

dan koordinasi pengentasan buta aksara yang dapat memberikan kontribusinya pada peningkatan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

- c. Diharapkan pihak pemerintah atau pemerintah daerah kecamatan Miomaffo secara krusial dapat mengaplikasikan implementasi kebijakan pemerintah daerah sebagai kontribusi penting guna mengoptimalkan pengentasan buta aksara sesuai prosedural, tujuan/hasil, monitoring dan evaluasi yang optimal sehingga tidak hanya sekedar mengejar laporan saja akan tetapi bagi pemerintah daerah dan masyarakatnya secara objektif dapat menindaklanjuti kegiatan memberantas buta aksara secara merata di masa kini dan masa yang akan datang lebih optimal.

### **5.2.2. Saran Praktis**

- a. Pemerintah daerah dalam hal ini UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) diharapkan menambah frekuensinya lagi dalam hal penyampaian komunikasi dan informasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan buta aksara secara intens, baik dengan aparat pemerintah kecamatan Miomaffo, dan warga wajib belajar.
- b. Pemerintah daerah, dalam hal ini UPTD Dispora sebaiknya pada kegiatan pengentasan buta aksara untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, menetapkan petugas di lapangan sesuai keahliannya, kedisiplinan aparat yang tegas dan fleksibel, dan sumber dana yang maksimal guna meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan.

- c. Diharapkan pelaksana pengentasan buta aksara, baik pemerintah daerah maupun peserta wajib belajar lebih bersikap optimis, loyal dan memberikan penghargaan pada petugas lapangan berupa penambahan insentif guna mengoptimalkan kegiatan pengentasan buta aksara.
- d. Pemerintah daerah diharapkan dapat memuat/prosedur kerja (SOP) dalam aturan baik melalui Perda mengenai masalah/kondisi di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan acuan yang baku terutama dalam program pengentasan buta aksara di Kecamatan Miomaffo.
- e. Diharapkan Pemerintah Daerah maupun UPTD Dispora secara operasional dapat memfasilitasi kelengkapan kegiatan belajar mengajar, peninjauan secara berkala ke lokasi, dan mengevaluasi kegiatan pengentasan buta aksara untuk perbaikan yang lebih optimal di masa kini dan yang akan datang.

